

Sesudah Bush, Apa?

Kompas, Senin, 27 November 2006

Ginandjar Kartasasmita

Bush datang, Bush pergi. Ini bukan pertama kali kunjungan seorang kepala pemerintah mendapat tanggapan dan reaksi besar dari masyarakat. Di tahun 1974, masyarakat, terutama mahasiswa, mengadakan demonstrasi besar terhadap kunjungan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang, sampai terjadi apa yang dikenal dengan peristiwa Malari. Reaksi atas kunjungan Bush tersebut memang meluas. Namun, syukurlah tidak terjadi insiden apa pun sampai Bush pulang.

Persoalannya kemudian adalah apa hasil kunjungan tersebut? Apakah ada manfaatnya buat Indonesia? Pembicaraan bilateral maupun pertemuan dengan wakil-wakil masyarakat yang dipilih untuk bertemu dengan Bush tidak menunjukkan hasil yang konkret. Tidak ada hal yang baru atau tanda-tanda bahwa akan ada sesuatu yang menguntungkan dari kunjungan ini. Tidak tampak adanya manfaat ekonomi ataupun politik bagi bangsa Indonesia.

Mungkin bagi Bush kunjungannya ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mempunyai nilai politik. Apalagi Bush dan partainya sedang dalam masa sulit dan harus berjuang keras menghadapi Pemilu Presiden 2008. Namun, sekali lagi, apa manfaatnya buat kita?

Tidak segarang Bush

Banyak yang menspekulasikan bahwa Partai Republik akan kalah dalam pemilu presiden mendatang. Sebagai pemenang, Partai Demokrat diyakini akan menempuh jalan yang berbeda dalam mengatasi masalah yang sama. Amerika di bawah Partai Demokrat diperkirakan tidak segarang di bawah Bush dan kelompok Neo-Conservative-nya yang menganut politik garis keras dan hitam putih. Hal tersebut diduga akan berpengaruh terhadap kebijakan luar negerinya, termasuk menyangkut masalah Irak. Akan tetapi, apakah betul akan demikian?

Angket menjelang pemilu (mid term election) Amerika yang lalu sebenarnya hanya menempatkan Irak sebagai masalah keempat, setelah isu ekonomi, korupsi, dan moralitas, serta terorisme. Namun, kekalahan Partai Republik dalam pemilu itu memang dipandang sebagai isyarat bahwa rakyat Amerika tidak lagi mendukung perang Irak. Maka, Bush mengganti Menteri Pertahanannya dan berusaha mencari jalan keluar yang terhormat dari Irak. Bush sebelumnya telah membentuk komite bipartisan yang melibatkan tokoh-tokoh kedua partai, yang salah satu opsinya adalah melibatkan kekuatan regional seperti Iran dan Suriah untuk menyelesaikan persoalan Irak. Namun, kita tidak bisa membayangkan bagaimana formula itu bisa jalan kalau masalah yang lebih besar di Timur Tengah tidak terselesaikan, yaitu masalah Palestina. Selama Amerika masih apriori mendukung Israel, konflik Timur Tengah termasuk masalah Irak sulit untuk diakhiri.

Jika partai Demokrat berkuasa, mereka pun akan menghadapi tantangan yang sama. Bagi yang optimistis, pemerintah Partai Demokrat bisa memanfaatkan momentum ini dengan memulai lembaran baru, mencari solusi baru yang adil bagi semua. Namun, yang pesimistis akan berkata Partai Demokrat yang secara tradisional didukung oleh kelompok-kelompok etnis, termasuk etnis Yahudi, tidak mudah untuk melepaskan diri dari perangkap persoalan Israel-Palestina itu.

Juga tidak bisa dipastikan bahwa Pemerintah Partai Demokrat akan lebih lunak dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Mungkin justru sebaliknya. Dengan sifatnya yang sangat liberal dan populis, pemerintahan Partai Demokrat malah cenderung bersifat intervensionis. Kalau kita lihat sejarah, Perang Korea terjadi pada masa Presiden Harry S Truman, sedangkan keterlibatan Amerika di Vietnam sudah terjadi sejak zaman Presiden John F Kennedy dan meledak menjadi perang besar pada masa Lyndon B Johnson. Ketiganya dari Partai Demokrat.

Operasi klandestin CIA menyerang Cuba—yang gagal—dan dikenal sebagai peristiwa Bay of Pigs dilakukan pada masa Presiden Kennedy. Tradisi intervensionis Amerika sudah dimulai sejak satu abad yang lalu ketika Presiden Woodrow Wilson mengatakan bahwa Amerika harus turut berperang dalam Perang Dunia I "to make the world safe for democracy". Wilson berasal dari Partai Demokrat. Amerika ikut Perang Dunia II di bawah Presiden Franklin D Roosevelt, juga dari Partai Demokrat. Presiden Truman pulalah yang memerintahkan digunakannya bom atom sebagai senjata pamungkas.

Lebih proteksionis

Sebagai pembenaran dari segi moral dan politik, Amerika—siapa pun dan dari partai mana pun yang berkuasa—menyatakan berhak untuk mengadakan intervensi kalau menyangkut hal-hal yang mereka anggap mendasar, seperti demokrasi dan hak asasi. Memang, dalam intervensi militer di luar wilayahnya, Amerika berusaha mengikutsertakan negara-negara lain atau lembaga internasional. Namun, jelas bahwa Amerika-lah yang berperan utama.

Dari sisi ini, bahkan ada kecenderungan Partai Demokrat lebih intervensionis karena harus merespons konstituennya yang beraneka ragam. Misalnya dalam bidang ekonomi, karena buruh adalah konstituen utamanya, Amerika di bawah Partai Demokrat bisa lebih proteksionis dan lebih ketat syarat perdagangan dan hubungan ekonominya. Kesimpulannya, siapa pun partai yang berkuasa di Amerika tidak akan banyak berpengaruh terhadap postur Amerika di dunia dan terhadap masalah-masalah dunia.

Yang mungkin berbeda adalah gaya kepemimpinan yang dibawakan oleh masing-masing individu; yang satu mungkin lebih santun dari yang lain. Namun, arus politik luar negeri dan kepentingan tidak akan banyak berubah hanya karena pergantian partai yang berkuasa.

Pesan intinya, kita jangan pernah menggantungkan urusan kita pada orang lain karena orang lain punya kepentingan sendiri. Kita harus memperkuat kemandirian, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik.

Oleh karena itu, saya berpendapat kita harus membuka semua pintu dalam hubungan luar negeri, jangan hanya satu atau dua pintu. Saya gembira mendengar dari Presiden SBY bahwa kita akan membeli persenjataan dari Rusia. Dengan demikian, kepentingan negara kita tidak usah tergantung pada segelintir anggota Kongres Amerika yang vokal dan punya agenda sendiri. Juga bahwa kita mempunyai sikap sendiri dalam soal Timur Tengah, dan membuka hubungan baik dengan negara seperti China dan Iran, yang sudah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa didikte oleh siapa pun, termasuk Amerika.

Saya juga menganjurkan untuk menjalin hubungan yang lebih dari hanya normatif dengan Presiden Hugo Chaves dari Venezuela dan Evo Morales dari Bolivia yang telah menunjukkan bahwa negara-negara yang relatif kecil itu tak gentar menghadapi negara tetangganya yang adikuasa. Khususnya untuk mengimbangi kunjungan Bush, alangkah baiknya kalau kita mengundang Presiden Chaves, apalagi sebagai sesama negara OPEC hubungan dengan Venezuela sangatlah alamiah. Yang penting Indonesia kembali menunjukkan politik luar negeri yang bukan hanya bebas dan aktif, tetapi juga bermartabat.

Ginandjar Kartasmita *Ketua DPD dan Ketua Dewan Pakar ICMI*